

# ANALISIS EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA (BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDA LITBANG) KOTA PALEMBANG

Sayid Abdurrahman Azmi<sup>1)</sup> dan Jusmani<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Alumni Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang,

<sup>2)</sup>Dosen akultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kota Palembang yang dapat mempengaruhi kinerja anggaran pada Pemerintah Kota Palembang.

Data yang diambil merupakan data target anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja pada tahun 2013-2015. Yang diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja dengan kriteria efektifitas sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996. Hasil Pembahasan dapat diketahui bahwa tingkat kriteria efektifitas berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja. Pada tahun 2013 tingkat efektifitas dari anggaran belanja pada persentase 83,73%. pada tahun ini anggaran dapat dikatakan cukup efektif, Pada tahun 2014 tingkat efektifitas Mengalami penurunan yaitu sebesar 1,27% dengan persentase sebesar 82,47%, penurunan terjadi tidak terlalu signifikan pada tahun ini di tahun ini juga anggaran dikatakan cukup efektif, dan pada tahun 2015 menurun sebesar 64,30%. Penurunan terjadi karena capaian PAD tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan dan juga ada beberapa Program/Kegiatan yang dibatalkan.

*Kata Kunci* : Efektifitas, Anggaran Belanja

## PENDAHULUAN

Seiring dengan adanya tuntutan akan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan reformasi pengelolaan sektor publik yang ditandai dengan munculnya pengaturan baru dari masyarakat kearah yang lebih baik (*new public management*), dengan tiga prinsip utamanya yaitu profesional, transparansi dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja pada instansi pemerintah merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan penilaian sampai dimana keberhasilan dan tingkat kemajuan dari sebuah sistema kerja pemerintahan akan terlihat berhasil atau tidak dan telah sesuai dengan visi dan misi pemerintah atau belum.

Dalam Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Daerah, Instansi pemerintah adalah sebuah kolektif dari

unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten serta Lembaga-lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu. Dengan anggaran manajemen dapat menentukan efektifitas dan

efisiensi suatu operasi dengan membandingkan antara anggaran dengan hasil aktual (realisasi terkini) yang dicapai.

Anggaran pemerintah terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat. Anggaran publik merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktifitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui Efektifitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kota Palembang.

## TINJAUAN TEORI

### 1. Pengertian Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Yang dimaksud daerah di sini adalah pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom berdasarkan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom ini terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Karena pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah pusat maka keuangan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari keuangan negara.

Sedangkan menurut Halim (2012:18) Keuangan Daerah adalah Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Pengertian Anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, pengertian anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tetetu

secara sistematis untuk satu periode. Anggaran menurut UU No 17 Tahun 2012 tentang Keuangan Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara/daerah (pusat atau daerah) yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran tersebut setiap tahun diajukan Pemerintah Pusat dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapat persetujuan. Sedangkan Menurut Wiratna (2015:28) Anggaran adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan segala aktivitas dan kegiatan organisasi pada pihak pemilik organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik.

### 3. Fungsi Anggaran

Menurut Mardiasmo (2013:63) anggaran mempunyai beberapa fungsi utama yaitu :Anggaran sebagai alat Perencanaan, Anggaran sebagai Alat Pengendalian (Control Tool), Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal , Anggaran sebagai alat politik, Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, Anggaran sebagai alat penilaian kinerja , Anggaran sebagai alat motivasi, Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik

### 4. Pengertian Belanja

Menurut Halim (2012:104) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah:“Merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaranbersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali olehpemerintah. Dan kembali dijelaskan dalam Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “Belanja adalahkewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilaikekayaan bersih”. Yang dapat disimpulkan bahwa transaksi belanja akanmenurunkan ekuitas dana pemerintah daerah Belanja Negara dalam APBN”.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

#### 4.1 Belanja langsung

Belanja langsung menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.Yang termasuk dalam Belanja Langsung adalah :

- belanja pegawai
- belanja barang dan jasa
- belanja modal (belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja asset lainnya).

#### 4.2 Belanja Pegawai

Belanja pegawai dalam Belanja Langsung dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah (Mursyidi, 2009:299). Belanja jenis ini antara lain untuk menampung honorarium panita pengadaan dan administrasi pembelian pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

#### 4.3 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/pemakaian jasa mencakup belanja barang habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

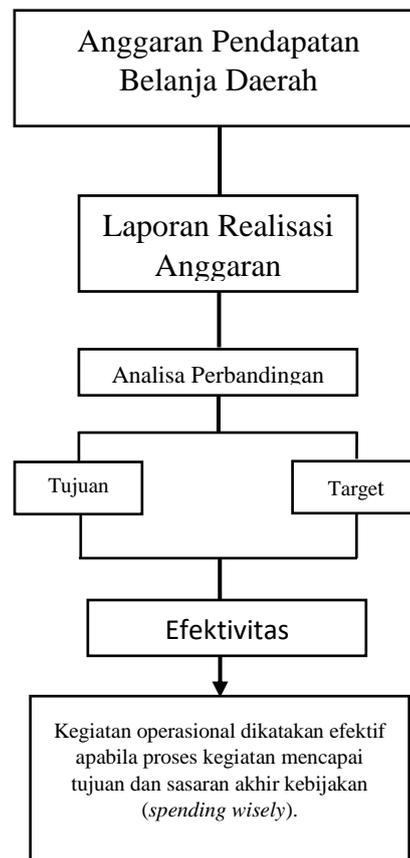
#### 4. Efektivitas

Mahmudi (2015:86) Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan . Kegiatan operasional

dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wesely*).

#### 5. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan suatu alur yang menggambarkan proses riset secara keseluruhan (Albert Kurniawan, 2014:57), sedangkan menurut Sugiyono (2016:283) Kerangka Pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.



#### PROSEDUR PENELITIAN

##### 1. Definisi Operasional Istilah

Menurut Wiratna (2014:87) Definisi Operasional adalah variabel penelitian yang dimaksudkan untuk

memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis. Sedangkan Menurut Jogiyanto (2012:159) Definisi Operasional adalah

variabel-variabel didalam model harus didefinisikan agar jelas makna dan pengukurannya.

**TABEL 1  
DEFINISI OPERASIONAL**

Analisis Istilah	Pengertian	Rumus	Keterangan
Efektivitas	Mardiasmo (2013:132) efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan ( <i>spending wisely</i> ).	$E = \frac{RAB}{AB} \times 100\%$	E = Efektivitas RAB = Realisasi Anggaran belanja AB = Anggaran Belanja

## 2. Populasi dan Sampel

### 2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016 : 81), sedangkan menurut Wiratna (2014:65) Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.. Populasi dalam penelitian ini adalah Anggaran Belanja Bappeda Litbang Kota Palembang.

### 2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian (Wiratna, 2014:65). Bila populasi besar dan peneliti tidak memungkinkan meneliti semua, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penelit dapat menggunakan sampel dari populasi itu. Sampel dari populasi ini adalah anggaran belanja Bappeda Litbang dari tahun 2013 sampai dengan 2015.

## 3. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:2) Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan cara kegunaan tertentu. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan pada bab sebelumnya, metode penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

### 3.1 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber (Wiratna, 2014:73) sedangkan menurut Istijanto (2006) dalam Danang Sunyoto (2013:21) Data Primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya.

#### b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016:137) Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sedangkan menurut Danang Sunyoto (2013:21) Sumber data Sekunder adalah data yang bersumber dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan setudi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

Data yang digunakan adalah data sekunder, penulis mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersil maupun non komersil.

### 3.2 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara-cara mengolah data yang telah terkumpul untuk kemudian dapat memberikan interpretasi dan pengolahan data dimaksud untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. Menurut Sugiyono (2016:147) "analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul".

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode analisis deskriptif. Sugiyono (2016:206) analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendepelintikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

**Tabel 2**  
**Rekapitulasi Anggaran Belanja Bappeda Libang Kota Palembang**  
**Tahun Anggaran 2013-2015**

Tahun	Target Belanja Bappeda Litbang			Realisasi Belanja Bappeda Litbang		
	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Total Belanja (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Total Belanja (Rp)
2013	5.920.301.150	22.747.836.572	28.668.137.722,28	4.405.573.626	19.098.529.277	24.004.102.929
2014	3.498.543.000	15.987.582.500	19.586.125.500	3.427.757.126	12.642.810.299	16.070.567.425
2015	4.043.449.000	15.149.409.650	19.192.858.650	3.630.556.452	8.710.610.348	12.341.166.800

Sumber : LKPJ Walikota Palembang

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penggunaan anggaran pada instansi khususnya pada Bappeda Litbang Kota Palembang masih belum mencapai target belanja hal itu mempengaruhi tingkat efektifitas anggaran belanja. Dapat dijelaskan Pada tahun 2013 Total target belanja Bappeda Litbang sebesar Rp.28.668.137.722,28 dengan total realisasi belanja sebesar Rp. 24.004.102,929 masih belum mencapai target belanja. Tahun 2014 target belanja Bappeda Litbang sebesar Rp. 19.987.582.500 dengan total realisasi belanja Rp. 16.070.567.425 tetap belum mencapai target belanja. Selanjutnya di tahun 2015 target belanja Bappeda Litbang sebesar Rp. 19.149.409.650 dengan total realisasi belanja sebesar Rp.

12.341.166.800 dan masih belum mencapai target. Dari tabel diatas pula dapat di lihat bahwa dari Tahun 2013-2015 Anggaran Bappeda Litbang Kota Palembang terus mengalami penurunan, penurunan itu terjadi karena target-target PAD Kota Palembang masih belum tercapai yang mengakibatkan anggaran menjadi defisit dan mempengaruhi anggaran Bappeda Litbang Kota Palembang.

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja keuangan Bappeda Litbang Kota Palembang mengevaluasi dan menganalisis Realisasi Anggaran dengan cara membandingkan Target dan Realisasi Anggaran dalam bentuk Program/Kegiatan yang ada di masing-masing Bidang dalam Bappeda Litbang Kota Palembang.

**Tabel 3**  
**Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2013**

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program perencanaan pembangunan daerah	2.417.355.000	1.460.475.670	60,42
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	170.875.000	92.599.200	54,19
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	453.650.000	323.243.400	71,25
Program perencanaan tata ruang	8.445.005.000	8.341.240.000	98,77
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	2.217.799.500	1.932.113.375	87,12
Program Kerjasama Pembangunan	1.946.550.000	1.024.729.141	52,64
Program Pengembangan data/informasi	1.727.863.000	1.434.561.600	83,03
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.463.291.822	1.934.007.647	78,51
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.797.229.000	1.559.848.244	86,79
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	83.500.000	72.180.000	86,44
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	215.300.000	153.072.450	71,10
Program Kegiatan Lanjutan dan Kewajiban kepada Pihak Ketiga	520.263.250	520.263.250	100,00

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	50.000.000	12.137.800	24,28
Program perencanaan pembangunan ekonomi	89.155.000	89.057.500	99,89
Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	150.000.000	149.000.000	99,33
<b>TOTAL</b>	<b>22.747.836.572</b>	<b>19.098.529.277</b>	

Sumber : LAKIP BAPPEDA 2013

Dari Tabel diatas menunjukkan dari masing-masing program pada tahun 2013 masih ada beberapa program yang realiasinya belum tercapai.

Penyebab belum terealisasi nya Program tersebut disebabkan oleh Efisiensi Anggaran, dan Kerjasama Pihak Ketiga yang tidak terlaksana.

**Tabel 4**  
**Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2014**

<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Capaian (%)</b>
Program perencanaan pembangunan daerah	1.677.324.500	1.007.903.697	60,09
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	335.970.000	280.000.000	83,34
Program perencanaan tata ruang	3.714.000.000	3.644.605.000	98,13
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	2.693.113.000	2.391.717.000	88,81
Program Kerjasama Pembangunan	725.905.000	609.117.660	83,91
Program Pengembangan data/informasi	1.917.020.000	500.572.700	26,11
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.101.407.500	1.729.678.167	82,31
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	958.000.000	869.233.075	90,73
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	112.500.000	106.720.500	94,86
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	213.662.500	125.517.500	58,75
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	547.000.000	456.375.000	83,43
Program perencanaan pembangunan ekonomi	151.680.000	145.345.000	95,82
Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	390.000.000	376.025.000	96,42
Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	450.000.000	400.000.000	88,89
<b>TOTAL</b>	<b>15.987.582.500</b>	<b>12.642.810.299</b>	

Sumber : LAKIP BAPPEDA 2014

Dari Tabel diatas menunjukan masih ada beberapa program yang belum terealisasi khususnya pada Program Pengembangan Informasi yang disebabkan oleh kurangnya tenaga ahli, efisiensi anggaran dan

tingkat kerjasama dengan pihak ketiga yang tidak terlaksana dan juga dikarenakan. Jika di teliti lebih jauh terdapat banyak kendala dalam merealisasikan anggaran.

**Tabel 5**  
**Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2015**

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program perencanaan pembangunan daerah	1.138.041.500	719.175.850	63,19
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	310.897.500	237.472.500	76,38
Program perencanaan tata ruang	1.150.000.000	925.425.000	80,47
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	5.305.296.000	2.213.874.500	41,73
Program Kerjasama Pembangunan	1.032.129.150	364.951.000	35,36
Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah	100.000.000	98.487.400	98,49
Program Pengembangan data/informasi	1.781.440.000	1.330.476.350	74,69
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.361.745.500	1.589.756.486	67,31
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.344.840.000	970.517.562	72,17
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	102.000.000	48.930.000	47,97
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	308.100.000	97.169.200	31,54
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	214.920.000	114.374.500	53,22
<b>TOTAL</b>	<b>15.149.409.650</b>	<b>8.710.610.348</b>	

Sumber : LKIP BAPPEDA 2015

Dari Tabel diatas menunjukan dari masing-masing program pada tahun 2013 masih ada beberapa program yang realiasinya belum tercapai. Penyebab belum terealisasi nya Program tersebut disebabkan oleh Efisiensi Anggaran, dan Kerjasama Pihak Ketiga yang tidak terlaksana.

## 2. Pembahasan

Analisis Efektifitas merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Digunakan

untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Kriteria efektifitas belanja sebagai berikut :

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Lebih dari 100 %	Sangat Efektif
90-100 %	Efektif
80-90 %	Cukup Efektif
60-80 %	Kurang Efektif
Dibawah 60 %	Tidak Efektif

Kepmendagri Nomor 690.900-327 tahun 1996

Tingkat Efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja. Rumus pengukuran menggunakan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}}$$

Hasil analisis dari efektivitas anggaran belanja pada Bappeda Litbang Kota Palembang berdasarkan tabel 6 ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Analisis Efektifitas Anggaran Belanja**

Tahun	$\frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100$	Analisis Efektifitas	Kriteria
2013	$\frac{\text{Rp. 24.004.102.929}}{\text{Rp. 28.668.137.722,28}} \times 100$	83,73 %	Cukup Efektif
2014	$\frac{\text{Rp. 16.070.567.425}}{\text{Rp. 19.586.125.500}} \times 100$	82,47 %	Cukup Efektif
2015	$\frac{\text{Rp. 12.341.166.800}}{\text{Rp. 19.192.858.650}} \times 100$	64,30 %	Kurang Efektif

Data hasil olahan

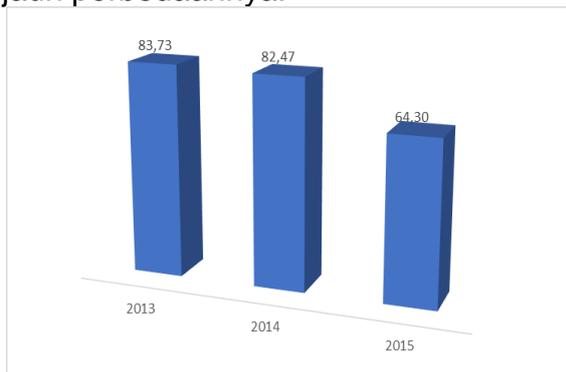
Dari tabel 6 diatas dapat dijelaskan pada tahun 2013 tingkat efektifitas dari anggaran belanja pada persentase 83,73% yang menunjukkan angka kisaran Rp. 24.004.102.929 pada tahun ini anggaran dapat dikatakan cukup efektif.

Mengalami penurunan pada tahun 2014 yaitu sebesar 1,27% dengan persentase sebesar 82,47% yang berada pada kisaran Rp. 16.070.567.425, penurunan terjadi tidak terlalu signifikan pada tahun ini dan pada tahun ini juga anggaran dikatakan cukup efektif. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 18,17% dengan persentase sebesar 64,30% yang berada pada kisaran Rp. 12.341.166.800, ditahun ini penggunaan anggaran dapat dikatakan kurang efektif karena penurunan PAD Kota Palembang yang disebabkan oleh tidak tercapainya target redistribusi pajak yang merupakan sumber utama untuk peningkatan PAD yang mempengaruhi anggaran program/kegiatan, kurang terserap nya

anggaran dan belum cukup efektif nya dalam membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah.

Apabila digambarkan dalam grafik, pergerakan Efektifitas Anggaran Belanja pada Bappeda Litbang Kota Palembang adalah, berdasarkan gambar dibawah dapat dijelaskan bahwa selama periode tahun anggaran 2013-2015, tingkat efektifitas anggaran belanja yang ada pada instansi Bappeda Litbang Kota Palembang terus mengalami penurunan. Penurunan yang signifikan terjadi di tahun 2015 yang dimana pada tahun 2014 efektifitas belanja sebesar 82,47 % dan pada tahun 2015 menurun sebesar 64,30%. Penurunan terjadi karena capaian PAD tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan dan juga ada beberapa Program/Kegiatan yang dibatalkan . Banyak hal yang memang menjadi tolak ukurnya untuk penetapan anggaran jika menilik lebih jauh dari struktur APBD yang ditetapkan pada masa periode tahun anggaran tersebut.

Efektifitas ditunjukkan berdasarkan perhitungan kriteria-kriteria yang ditetapkan memiliki tingkat yang berdeda-beda dalam periode tahun-tahun nya. Kurang dan tidak efektifnya penggunaan anggaran adalah disebabkan oleh relisasi anggaran yang ditetapkan masih terlalu jauh dari target yang ditetapkan. Yang terendah terjadi pada tahun 2015 karena realisasi anggaran nya masih terlalu jauh perbedaannya.



### 3. Analisis Efektifitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Bappeda Litbang Kota Palembang.

Pada tahun 2014 anggaran Belanja Langsung Bappeda Litbang Kota Palembang sebesar Rp. 15.987.582.500 dengan realisasi sebesar Rp. 12.642.810.299 dengan persentase 79,08%. Terjadi penurunan yang signifikan dari anggaran belanja langsung pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 22.747.836.572 dengan realisasi sebesar Rp. 19.098.529.277 dengan persentase 83,96%. Penurunan terjadi karena tidak tercapainya Target PAD Kota Palembang dan ada beberapa Program di tahun 2013 tidak ada di tahun 2014 seperti Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Selain itu juga terdapat kenaikan dan penurunan persentase capaian program 2013 dengan 2014. Kenaikan

yang signifikan terjadi pada Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar dimana persentase capaian program pada tahun 2013 sebesar 24,28% sedangkan tahun 2014 sebesar 83,43% atau naik sebesar 59,15 %, kenaikan terjadi disebabkan karena pada tahun 2014 tersedianya tenaga-tenaga ahli yang berkompeten dalam bidang tersebut. Dan kenaikan juga menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pada program pada tahun 2014 bisa dikatakan cukup efektif. Lalu terjadi penurunan persentase capaian program di tahun 2014 yaitu Program Pengembangan data/informasi dimana pada tahun 2013 capaian persentase tersebut sebesar 83,03% dan sedangkan tahun 2014 sebesar 26,11 % atau menurun sebesar 56,92 %. Penurunan tersebut disebabkan kurang terkoordinasinya Bappeda Litbang dengan SKPD yang bersangkutan seperti pengumpulan-pengumpulan data yang diperlukan dalam program tersebut.

Di tahun 2015 anggaran belanja langsung Bappeda Litbang Kota Palembang sebesar Rp. 15.149.409.650 dengan realisasi sebesar Rp. 8.710.610.348 dengan persentase capaian sebesar 57,50 %. Anggaran ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 15.987.582.500 dengan realisasi sebesar Rp. 12.642.810.299 dengan persentase 79,08%. Sama seperti di tahun 2013 dengan 2014 penurunan anggaran di tahun 2015 juga disebabkan tidak tercapainya target PAD Kota Palembang disebabkan karena target redistribusi pajak di kota Palembang belum tercapai. Penurunan anggaran juga mempengaruhi Program pada tahun 2015 dimana ada beberapa kegiatan ditahun 2014 tidak ada di tahun 2015 seperti kegiatan Program perencanaan

pengembangan kota-kota menengah dan besar, Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana dan Program perencanaan pembangunan ekonomi, tetapi di tahun 2015 juga ada program yang tidak ada di tahun 2014 seperti Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dan Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah.

Terdapat juga kenaikan dan penurunan persentase capaian program di tahun 2015 sebesar terjadi di program Kerjasama Pembangunan pada tahun 2014 persentase capaian sebesar 83,91 % dan tahun 2015 sebesar 35,36 % atau selisih sebesar 48,55 %. Penurunan capaian tersebut terjadi karena terdapat kegiatan yang tidak di realisasikan atau tidak di jalankan karena kendala tenaga ahli kurang memadai, dan juga terkendala oleh kebijakan-kebijakan peraturan. Diikuti dengan kenaikan Program Data/informasi sebesar 48,58 % dimana pada tahun 2014 capaian persentase program sebesar 26,11 % dan tahun 2015 sebesar 74,69 %.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1.1 Tingkat Kriteria Efektifitas Anggaran pada Bappeda Litbang Kota Palembang tahun Anggaran 2013-2015 sangat berfluktuasi. Yang tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan terendah terjadi pada tahun 2015. Anggaran belanja pada tahun 2013 sampai dengan 2014 bisa dikatakan cukup efektif tetapi pada tahun 2015

tingkat efektifitas nya masih kurang karena realisasi anggaran masih berbeda jauh terhadap target, perbedaan ini terjadi karena adanya beberapa program/kegiatan yang telah dianggarkan belum dilaksanakan dan terjadinya penurunan PAD Kota Palembang.

1.2 Tingkat Efektifitas juga dipengaruhi oleh Anggaran dan Realisasi keuangan dari program-program yang ada di Bappeda Litbang Kota Palembang. belum teralisasinya program-program tersebut dikarenakan rumitnya birokrasi dan terlalu memakan waktu dalam pelelangan pekerjaan yang berhubungan dengan pihak ke 3 atau pihak swasta serta kurang koordinasi nya dengan pemerintah pusat.

### **2. Saran**

Saran bagi Instansi Bappeda Litbang Kota Palembang adalah

2.1 Bappeda Litbang Kota Palembang sebagai perencanaan anggaran untuk Kota Palembang juga harus bisa merencanakan anggaran Instansi sendiri sesuai dengan kebutuhan agar penyerapan anggaran dari tahun ke tahun terus efektif. Dan dalam merencanakan anggaran harus memperhatikan kebijakan antara realisasi dan anggaran, dan hendaknya memperhatikan situasi dan kondisi agar anggaran yang ada dan sudah disusun dapat direalisasikan dengan baik.

2.2 Bagi Bappeda Litbang agar semakin meningkatkan kinerja dalam pengelola anggaran belanja daerah secara khusus

dan APBD secara umum. Dengan kinerja yang baik maka efektivitas, produktivitas dan efisiensi belanja juga akan semakin baik. Terutama dalam meningkatkan kinerja anggaran agar optimalisasi yang diinginkan segera terlaksana sesuai visi dan misi Bappeda Litbang Kota Palembang.

2.3 Kedepannya disarankan untuk Intansi Bappeda Litbang Kota Palembang agar dalam Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) Kota Palembang dibuat analisis Efektifitas Anggaran supaya bisa menilai tingkat efektifitas dan bisa menilai kinerja anggaran yang dilakukan dalam satu tahun.

2.4 Penetapan Target Anggaran harus disesuaikan dengan realisasi Kota Palembang.

*Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*: Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 *Tentang Standar Akuntansi Keuangan*.

Sujarweni, V Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta.

Sugiyono. 2016 . *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta : Bandung.

Sujarweni, V Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.

Hartono, Jogiyanto. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis -Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Edisi 5. Yogyakarta : BPPE UGM

Kurniawan, Albert. 2014. *Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis*. Alfabeta: Bandung.

Mahmudi, 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.

Mardiasmo. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman*